BAB VI

KESIMPULAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak pemekaran wilayah terhadap berbagai indikator makroekonomi di Provinsi Papua meliputi pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pendapatan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berdasarkan kepada temuan dan analisis empiris menggunakan regresi data panel tahun 2010–2022, dapat disimpulkan bahwa pemekaran wilayah belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penguatan pertumbuhan ekonomi masing-masing wilayah baik yang dimekarkan maupun wilayah induknya.

Selanjutnya, pemekaran wilayah aspek kemiskinan yang ditimbulkan oleh pemekaran wilayah adalah terlihat wilayah yang dimekarkan lebih miskin dibandingkan dengan wilayah induk. Begitu juga halnya dengan IPM, ditemukan bahwa IPM daerah pemekaran relatif lebih baik di wilayah pemekaran dibandingkan dengan wilayah induk di Papua. Kabupaten dan Kota yang dimekarkan memiliki tingkat ketimpangan yang tinggi dibandingkan dengan daerah induk. Untuk itu, barbagai pihak (stakeholders) untuk pembangunan wilayah Papua terutama untuk kebijakan pembangunan wilayah memerlukan perhatian dalam permasalahan pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan ketimpangan pendapatan daerah dalam konteks pemekaran wilayah.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diperoleh, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak-pihak terkait dalam merumuskan kebijakan pembangunan pascapemekaran wilayah di Papua. Pertama, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah perlu memfokuskan program pengentasan kemiskinan secara lebih serius di wilayah-wilayah pegunungan Papua yang secara konsisten menunjukkan tingkat kemiskinan yang tinggi. Upaya ini dapat dilakukan melalui pembangunan infrastruktur dasar yang memadai, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi wilayah.

Selanjutnya, perhatian juga perlu diberikan kepada wilayah-wilayah hasil pemekaran yang masih menghadapi tingkat kemiskinan tinggi dan keterbatasan kapasitas fiskal. Pemerintah perlu memastikan bahwa pemekaran tidak hanya menambah struktur administrasi, tetapi juga diiringi dengan alokasi anggaran yang adil, program pembangunan yang menyasar kebutuhan dasar masyarakat, dan penguatan tata kelola pemerintahan daerah. Dalam konteks pembangunan manusia, penting bagi pemerintah untuk memperkuat kebijakan peningkatan IPM secara lebih merata, khususnya di wilayah induk dan wilayah pesisir hasil pemekaran yang menunjukkan IPM lebih rendah. Pemerintah daerah harus

mengoptimalkan penggunaan dana transfer pusat untuk membiayai sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat yang secara langsung berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup penduduk. Sementara itu, untuk mengatasi persoalan pengangguran, diperlukan program pelatihan keterampilan dan pengembangan usaha produktif yang disesuaikan dengan kondisi geografis dan potensi ekonomi lokal. Wilayah pegunungan membutuhkan pendekatan khusus agar mampu menciptakan peluang kerja yang layak dan berkelanjutan, mengingat tantangan infrastruktur dan akses pasar yang lebih terbatas dibanding wilayah pesisir

Terkait dengan ketimpangan pendapatan, kebijakan fiskal dan pembangunan harus diarahkan untuk memperkecil kesenjangan antarwilayah, terutama antara wilayah induk dan hasil pemekaran, serta antara wilayah pesisir dan pegunungan. Pemerintah perlu mendorong pemerataan investasi publik, penyediaan layanan dasar yang setara, dan pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi di wilayah-wilayah yang tertinggal. Terakhir, karena variabel kepadatan penduduk menunjukkan hubungan yang positif terhadap pembangunan dan negatif terhadap kemiskinan dan pengangguran, maka kebijakan kependudukan seperti pemerataan persebaran penduduk, dukungan terhadap migrasi terencana, serta penguatan pusat-pusat pertumbuhan baru dapat menjadi alternatif solusi untuk mengurangi tekanan pembangunan yang timpang dan mempercepat pemerataan kesejahteraan di Papua.

Dengan saran-saran tersebut, diharapkan proses pemekaran wilayah di Papua ke depan tidak hanya menghasilkan struktur administrasi baru, tetapi juga mampu menjadi pendorong pembangunan yang berkeadilan dan inklusif bagi seluruh masyarakat, dan terhadap kinerja makro ekonomi di Papua. Beberapa kelemahan yang didapat dari riset ini. Sarannya untuk riset ke depan.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA